

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)

DINAS PERIKANAN



TAHUN ANGGARAN

2023



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perikanan Tahun 2022 ini dapat tersusun. Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dari Dinas Perikanan sebagai instansi Pemerintah untuk melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Malinau yang meliputi 2 (Dua) bidang yaitu Bidang Usaha Perikanan dan Perikanan Budidaya. Pelaksanaan kegiatan tersebut, berdasarkan visi dan misi organisasi yang telah dicanangkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Malinau Tahun 2022, masih memiliki banyak kekurangan, namun demikian diharapkan agar dapat bermanfaat bagi kita dalam membangun sektor Perikanan di Kabupaten Malinau untuk mewujudkan perikanan yang modern, tangguh dan efisien menuju masyarakat petani yang sejahtera.

Kepada semua pihak yang telah memberikan informasi, saran dan pendapat untuk penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Malinau, 15 Maret 2023

Kepala Dinas Perikanan



Muhamad Kadri, S.Sos, M.Si
Nip. 19670717 199803 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau, Dinas Perikanan mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau adalah 111,715 % yang dapat dilihat pada tabel rencana eksekutif (RE) 1:



**Tabel Rencana Eksekutif (RE) 1 :
Capaian Sasaran Strategis**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	184	154,73	84,09
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	70	97,54	139,34
Rata-Rata Capaian Kinerja					111,715



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	3
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Sumber Daya Manusia Aparatur	6
F. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi.....	7
G. Sistematika Penyajian	8
BAB II. Perencanaan Kinerja	9
A. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021	10
1. Visi.....	11
2. Misi.....	12
3. Tujuan dan sasaran Pembangunan.....	13
4. Indikator Kinerja	14
5. Strategi dan Arah Kebijakan	15
6. Program	16
B. Rencana Kinerja Tahunan	17
C. Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III. Akuntabilitas Kinerja.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Analisis Capaian Kinerja	21



C. Realisasi Anggaran	22
BAB IV. Penutup	23
A. Kesimpulan.....	24
B. Langkah Perbaikan	25
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah No .4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang perikanan dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malinau di bidang perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 306 Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang di berikan kepada Kabupaten. Secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang**



- usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
2. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan ;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan oleh Bupati.

C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 , Pasal 306 Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di Bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Malinau periode 2021 – 2026 adalah *"Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional"*. Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malinau. Visi tersebut mengandung makna bahwa



Kabupaten Malinau dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang maju dan sejahtera dalam kebersamaan berdasarkan falsafah Pelangi.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, ada 4 (Empat) misi yang harus dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari falsafah pelangi, dimana Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan fungsi Pelaksana dari misi ke 2 (Dua) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni *"Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal"*.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, telah disusun program prioritas pembangunan periode 5 (lima) tahun kedepan (2021 – 2026) yang terdiri dari 5 (Lima) program utama diantaranya yaitu :

- 1. Program Desa Sarjana**
- 2. Program Milenial Mandiri**
- 3. Program Rasda Plus**
- 4. Program RT Bersih**
- 5. Program WM Malinau Maju (Wajib Belajar, Malinau Maju)**

Program-program yang hendak dicapai diuraikan dalam wujud kegiatan/ sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan dengan asumsi menopang *"Pertumbuhan Ekonomi Meningkat (Goal)" pada tahun 2021 - 2026* dari sektor perikanan didukung pagu dana indikatif sesuai kebutuhan.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Perikanan Kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian



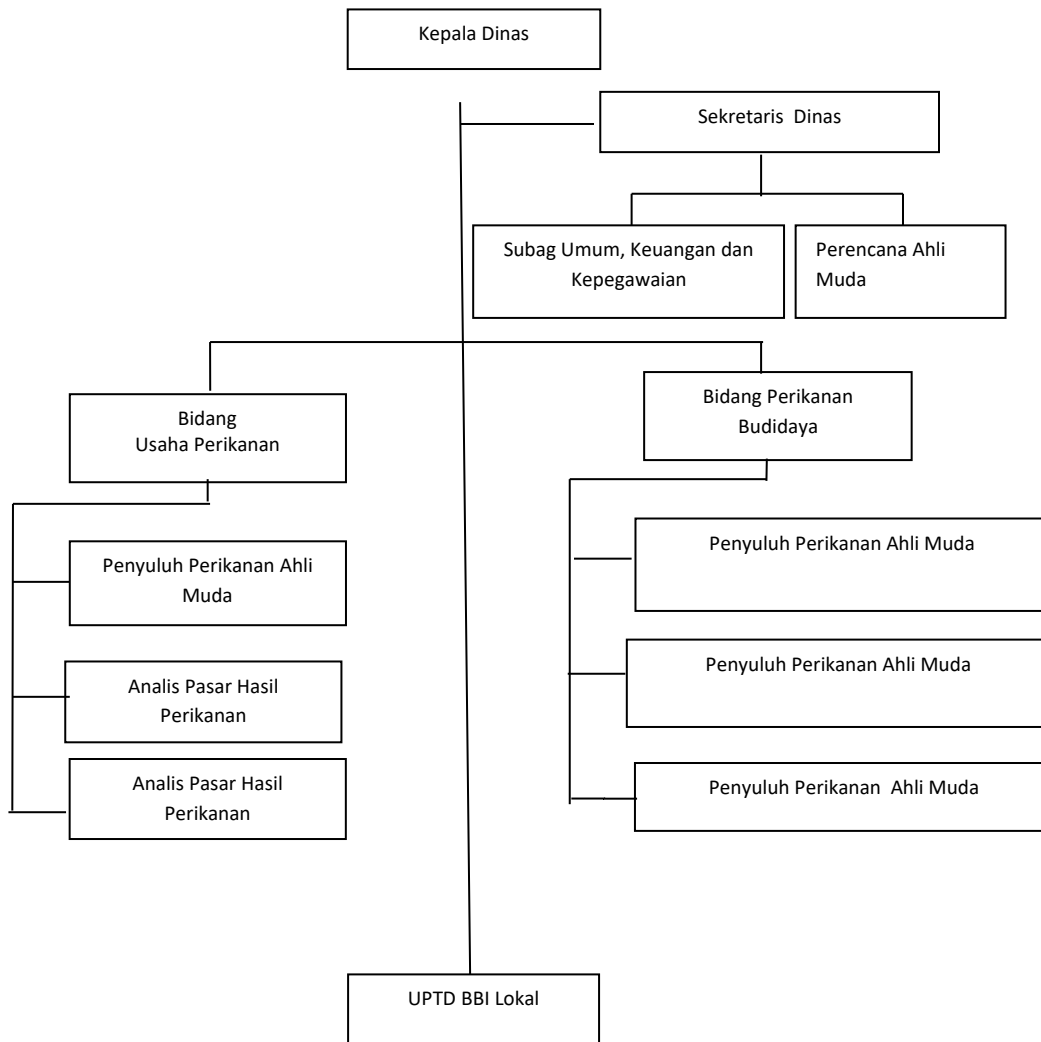
Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016, sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat, terdiri dari :**
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan**
 - b. Perencana Ahli Muda**
- 3. Bidang Usaha Perikanan terdiri dari :**
 - a. Penyuluh perikanan ahli muda**
 - b. Analis pasar hasil ikan**
 - c. Analis pasar hasil ikan**
- 4. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :**
 - a. Penyuluh perikanan ahli muda**
 - b. Penyuluh perikanan ahli muda**
 - c. Penyuluh perikanan ahli muda**
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Selanjutnya Bagan dan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.



Gambar 1.1



E. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau per 31 Desember 2022 memiliki sumber daya manusia aparatur sebagai berikut :



Tabel 1.2

**Jumlah PNS dan PPT Dinas Perikanan
Kabupaten Malinau Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022**

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1.	SMP	1	-	1
2.	SMA	4	-	4
3.	Diploma	4	-	4
4.	Sarjana	12	-	12
5.	Pasca Sarjana/S2	6	-	6
Jumlah				27

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2022

Berdasarkan dari tabel 1.2, terlihat bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perikanan sebagian besar berpendidikan Strata Satu (Sarjana / S1) sebanyak 12 orang, SMA sederajat sebanyak 4 orang, Pasca Sarjana (S2) sebanyak 6 Orang, Diploma 4 dan SMP 1 orang. Berdasar jenjang pendidikan tersebut menunjukkan bahwa SDM Aparatur Dinas Perikanan masih kekurangan tenaga staf untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.

Jumlah pegawai Dinas Perikanan berdasarkan tingkat Golongan



Tabel 1.3.

**Jumlah PNS Dinas Perikanan
Kabupaten Malinau Berdasarkan Golongan
Tahun 2022**

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan II	6
2.	Golongan III	19
3.	Golongan IV	2
Jumlah		27

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2022

Dilihat dari tabel 2 jumlah PNS berdasarkan golongan tersebut di atas, golongan II sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 19 orang, golongan IV sebanyak 2 orang. Di samping jumlah PNS yang memiliki tingkat pendidikan juga telah mengikuti diklat kepemimpinan.

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :



Tabel 1.4.
Jumlah PNS Dinas Perikanan
Kabupaten Malinau Yang Telah Mengikuti Diklat
Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Diklat PIM II	1
2.	Diklat PIM III	1
3.	Diklat PIM IV	3
4.	Pejabat yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai Jabatannya	6

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2022

Dilihat dari tabel 1.4 jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat PIM II sebanyak 1 (satu) orang, PIM III sebanyak 1 (satu) orang, dan PIM IV sebanyak 3 orang, sebanyak 1 orang Pejabat Eselon IV belum mengikuti Diklat Kepemimpinan IV dan sebanyak 5 orang pejabat fungsional yang belum sempat mengikuti Diklat kepemimpinan IV. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat, maka Diklat Kepemimpinan wajib diikuti.

Jumlah pegawai Dinas Perikanan yang memiliki jabatan eselon dapat dilihat pada table 1.4



Tabel 1.5
Jumlah PNS Dinas Perikanan
Kabupaten Malinau Berdasarkan Eselon
Tahun 2022

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	Eselon II b	1
2.	Eselon III a	1
3.	Eselon III b	2
4.	Eselon IV a	2
5.	Jafung	7
	Jumlah	13

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2022

Permasalahan Utama

Paradigma Pembangunan Kabupaten Malinau 2021-2026 melalui Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau yang sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan pembudidaya ikan. Untuk peran Dinas Perikanan Kabupaten Malinau sangat penting dalam menyukseskan pembangunan Kabupaten Malinau dengan visi : *"Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional"*

Kabupaten Malinau dengan bentang alam yang sangat luas merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau untuk mengembangkan dan meningkatkan target pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Peluang tersebut jika didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada nelayan dan pembudidaya ikan; tersedianya sumber daya perikanan yang andal dan profesional; tersedianya prasarana dan sarana perikanan yang mencukupi; lingkungan kerja yang sehat; minat dan



kemauan yang besar dari masyarakat dalam pengembangan usaha di bidang perikanan.

Dinas Perikanan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016, mengemban tugas sesuai asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu ada kendala/tantangan yang dihadapi, terlebih keberadaan Dinas Perikanan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk tentu memerlukan pembenahan Internal organisasi, untuk mengetahui hal tersebut, perlu diadakan analisis terhadap keberadaan SKPD itu sendiri.

Analisis internal Dinas Perikanan Kabupaten Malinau memiliki kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Kekuatan yang dimiliki SKPD yaitu :

- a. Memiliki sumber daya lahan perikanan yang cukup potensial;
- b. Memiliki struktur organisasi yang jelas;
- c. Dukungan dana;
- d. Tersedianya data dasar perikanan;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana.

Dibalik kekuatan yang dimiliki, di sisi yang lain juga mempunyai kelemahan antara lain :

- a. Alih fungsi lahan yang cenderung meningkat;
- b. Belum lengkapnya standar operasional prosedur;
- c. Lemahnya manajemen pengelolaan data;
- d. Masih lemahnya koordinasi;
- e. Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan.

Melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki SKPD, tantangan/hambatan dapat diatasi dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan mereduksi kelemahan, untuk meraih peluang dalam rangka pengembangan pelayanan SKPD.



Peluang yang dapat diraih antara lain :

- 1. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik Aparatur Sipil Negara maupun Nelayan Kecil melalui diklat, bimbingan teknis, kursus dan sejenisnya;**
- 2. Mengoptimalkan fungsi Balai Benih Ikan (BBI), Kawasan Minapolitan serta potensi lahan perikanan yang ada dengan didukung rekayasa teknologi pakan buatan/pakan mandiri yang bermutu;**
- 3. Merekrut generasi muda untuk mau menekuni perikanan dengan memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan dalam menekuni usaha perikanan;**
- 4. Meningkatkan sarana/prasarana untuk memperlancar transportasi hasil-hasil perikanan;**
- 5. Meningkatkan kuantitas benih ikan dan mutu benih ikan dan pengolahan hasil-hasil perikanan yang lebih variatif dan higienis;**
- 6. Mempermudah akses ke sumber-sumber pembiayaan dan akses pemasaran serta jaminan harga.**

Dengan dukungan *stakeholder* dan *political will* dari pemerintah, maka tantangan akan dapat diatasi dan peluang pengembangan pelayanan SKPD ke depan dapat diupayakan secara optimal. Adapun yang menjadi kendala saat ini adalah akses pemasaran, biaya produksi yang tinggi, masih rendahnya sumber daya manusia pengolahan hasil perikanan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi daerah, salah satunya mungkin dapat ditempuh dengan menekan biaya produksi serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan pembudidaya serta menggencarkan promosi.

F. Sistematika Penyajian

Pelaporan kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dan analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja tahun 2023. Rencana analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan



diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja : pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja :

A. Capaian Kinerja Organisasi :

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan indikator kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi;

B. Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan indikator kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;



- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);**
- 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;**
- 6. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya;**
- 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dan berakhir masa jabatan oleh DPRD Malinau dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Malinau mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yakni misi ke-2, Yaitu **"Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal"**.



Adapun sasaran dalam pelaksanaan misi ini, Dinas Perikanan Kabupaten Malinau mendukung sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Perikanan yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang dilaksanakan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang Perikanan. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Malinau *"Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional"*, maka tujuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dituangkan dalam pernyataan meningkatnya hasil perikanan untuk meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Malinau.

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan fungsi *Pelaksana* dari misi ke-2 (dua) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni *"Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal"*.

1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Malinau periode 2021 – 2026 adalah *Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional*. Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malinau. Visi tersebut



mengandung makna bahwa Kabupaten Malinau dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang maju dan sejahtera .

2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, ada 4 (Empat) misi yang harus dilaksanakan, dimana Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan fungsi *Pelaksana* dari misi ke 2 (Dua) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni *Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal*.

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Perikanan perlu ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sedangkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan selama kurun lima tahun sesuai dengan misi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	68	70	72	74	276	78
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	175	184	193	202	212	222

Sumber : Data Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya

4. Indikator Kinerja

Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa setiap SKPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perikanan telah menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Untuk mencapai 1 (satu) sasaran yaitu : "Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan"

Dengan melalui 1 (satu) strategi yaitu : "Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk peningkatan hasil perikanan".



Untuk melaksanakan strategi dan mencapai tujuan serta sasaran ditempuh melalui 1 (satu) arah kebijakan yaitu pengembangan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Data
1.	Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Budidaya Perikanan}}{\text{Jumlah Target Produksi Budidaya Perikanan}} \times 100\%$
			Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap}}{\text{Jumlah Target Produksi Perikanan Tangkap}} \times 100\%$

Sumber : Data perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya

Untuk mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja utama yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tentu sangat memerlukan dukungan sarana prasarana pendukung seperti :

meningkatnya penerapan teknologi perikanan; meningkatnya produksi perikanan meningkatnya penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk serta meningkatnya jumlah dan pemeliharaan/perbaikan infrastruktur perikanan. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama SKPD yang telah ditetapkan lewat IKU di atas, tentu saja tidak boleh lepas dari sasaran dan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021 –



2026 yang telah ditetapkan lewat Peraturan Daerah, karena pada dasarnya penyusunan Rencana Strategis SKPD wajib mengacu kepada RPJMD.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III di depan, bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan Misi ke-2 Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026, "*Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal*". Salah satu *tujuan* yang berkaitan dengan indikator kinerja utama SKPD adalah *Meningkatnya Nilai tambah dan pendapatan nelayan tangkap dan pembudidaya ikan*.

Indikator Kinerja Utama yang mengacu kepada sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan (Rencana Strategis SKPD), juga telah mengacu *kepada sasaran RPJMD 2021 – 2026 yang berbunyi Mengembangkan Produk Unggulan*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara hierarki, Indikator Kinerja Utama SKPD, sepenuhnya telah mengacu kepada sasaran yang telah ditetapkan oleh SKPD maupun telah mengakomodir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021 – 2026.

5. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan selama lima tahun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :



Tabel 2.3
Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	<i>Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional</i>		
Misi 2	:	<i>Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal</i>		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk peningkatan hasil perikanan	Pengembangan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau 2021 - 2026, maka Dinas Perikanan perlu menyusun strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu, dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan.

Kebijakan yang perlu ditempuh agar tercapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Perbaikan dan peningkatan infrastruktur
- 2) Pengembangan pusat pembenihan
- 3) Penyediaan peralatan dan sarana produksi
- 4) Penyediaan jaminan kredit bagi pembudidaya ikan dan perikanan tangkap
- 5) Peningkatan keterampilan pembudidaya ikan
- 6) Pengembangan kelembagaan kelompok perikanan
- 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh perikanan



6. Program

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah disusun. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan tujuan strategis yang terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait.

Ikhtisar masing-masing sasaran dan program dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Sasaran dan Program Kegiatan Perikanan Tahun 2022.

SASARAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
1	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.958.319.021,00
			Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan konsultasi SKPD	Belanja perjalanan dinas biasa	38 Kali	69.096.000,00
			Administrasi umum perangkat daerah	Penyedia bahan logistik kantor	1 Paket	24.387.000,00
				Penyedia Barang Cetakan dan penggandaan	100 exemplar	6.515.750,00



2	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	101.010 ekor dan 31 unit	714.029.000,00
3	Meningkatnya Pemanfaatan Sumber daya Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	194 pasang, 200 liter, 400 kg, 1 unit, 10 buah dan 2 je	99.992.400,00
				Penyedia Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	24,875.625,00
			Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya Ikan kecil	Pemberian Pendampingan, kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	152 Orang	159.288.350,00
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2022						5.056.503.146,00

Dari table di atas Dinas Perikanan pada tahun 2022 akan melaksanakan rencana kinerja dengan 3 (tiga) Program dengan 6 (Enam) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan.



B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap dengan menetapkan target yang akan dicapai. Target yang ditetapkan merupakan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dapat dilihat pada table 2.4.

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	184
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	70

Sumber : Data Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya

Untuk mendukung rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan disusunlah rumusan rencana program dan kegiatan yang dapat dilihat pada table 2.6



Tabel 2.6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun rencana)			
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3.25	Urusan Pilihan					
3.25	Bidang Urusan Pemerintahan					
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	SKPD	12 Bulan	3.958.319.021,00	APBD II
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	SKPD	35 Laporan	69.096.000,00	APBD II
		Jumlah Kebutuhan ATK	SKPD	1 Paket	24.387.000,00	APBD II
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	SKPD	1Paket	6.515.750,00	APBD II
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan diperairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	Kab. Malinau	1 dokumen	25.000.000,00	APBD II
		Jumlah alat tangkap ikan untuk nelayan tangkap	Kab, Malinau	2 Jenis	689.029.000,00	APBD II
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					
3.25.04.2.02.04	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	Kab. Malinau	11 Kelompok	159.288.350.00	APBD II



		Penyelenggara n Pendidikan dan Pelatihan				
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Malinau	1 Dokumen	24.875.625,00	APBD II
		2.Jumlah Kebutuhan pakan ikan	BBI Kaliyamok	4 unit	99.992.400,00	APBD II

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahunan pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Penetapan Perjanjian Kinerja tahunan merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	184 Ton
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	70 Ton



No	Program	Anggaran	Keterangan
	Penunjang	Urusan	
1.	Pemerintahan	Daerah	
	Kabupaten/Kota	Rp	99.998.750,00
			APBD
2.	Pengelolaan	Perikanan	
	Budidaya	Rp	284.156.375,00
			APBD
3.	Pengelolaan	Perikanan	
	Tangkap	Rp	714.029.000,00
			APBD
	Jumlah	Rp	1.098.184.125,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik yaitu laporan kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana Tingkat pencapaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:**

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Dinas Perikanan diukur dengan menggunakan rumus formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk membuat kesimpulan hasil dari evaluasi kinerja dibuat skala pengukuran kinerja dengan skala pengukuran ordinal :

85 s/d > 100 % = Sangat baik/sangat berhasil

70 < 85 % = Baik/berhasil

55 < 70 % = Sedang/cukup berhasil

< 55 % = Kurang berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun Capaian Kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1.



Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian %
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	184	154,73	84,09
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	70	97,54	139,34
Rata rata Capaian					111,715

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya dan perikanan Tangkap

B. Analisis Capaian Kinerja

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.



Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 1 sasaran selama tahun 2022 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian sangat rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Governance*)

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Governance*) melalui 1 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	184	154,73	84,09
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	70	97,54	139,34
Rata-rata capaian				111,715

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya dan perikanan Tangkap

Dari capaian indikator sasaran tersebut dapat ditunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Malinau masih dikategorikan Sangat berhasil. Selama periode tahun 2022 Dinas Perikanan telah



melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

1. Produksi Perikanan Budidaya

Berdasarkan indikator kinerja sasaran “ **Produksi Perikanan Budidaya**” terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 dengan target yang telah ditetapkan di RENSTRA tahun 2021-2026 yaitu sebesar 184 ton dan terealisasi produksi perikanan budidaya 154,73 atau masih kurang sebanyak 29,27 Ton dari target yang telah ditetapkan, ini terlihat bahwa target produksi tidak terpenuhi dengan capaian hanya 84,09 % dengan hasil evaluasi kinerja masih bisa dikategorikan Cukup Berhasil.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung produksi perikanan budidaya yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi Produksi Perikanan Budidaya}}{\text{Target Produksi Perikanan Budidaya}} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut :



Tabel 3.3

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir**

IKU/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 Vs 2020- 2021	
			2020	2021	2020 (4:3x100)	2021 (5:3x100)
1	2	3	4	5	6	7
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	154,73	41,52	120	26,83	77,55

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya

Sebagai salah satu sumber protein hewani yang utama bagi masyarakat, ikan menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan system ketahanan pangan. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran terhadap gizi dan kesehatan menyebabkan tingkat konsumsi ikan per kapita menjadi meningkat. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani, maka pemerintah harus dapat menjaga ketersediaan ikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan tabel 3.3 di atas tampak bahwa peningkatan realisasi kinerja terhadap indikator produksi perikanan budidaya bervariasi setiap tahunnya, yakni dari tahun 2022 terhadap tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi tahun 2022 sebesar 154,73 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 41,52 atau realisasi capaian kinerja sebesar 26,83 % dan realisasi tahun 2021 sebesar 120 atau realisasi capaian kinerja sebesar 77,55 %. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut



menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 272,66% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 28.94 % terhadap capaian tahun 2021

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

IKU/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	154,73	222	69,69

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi produksi perikanan Budidaya tahun 2022 sebesar 154,73 Ton dengan target Renstra tahun 2026 sebesar 222 Ton, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2022 sebesar 69,69 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan



Dari table-tabel perbandingan diatas yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemamparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Dari tabel 3.4 capaian indikator peningkatan Perikanan Budidaya untuk tahun 2022 produksi Perikanan Budidaya mencapai sebanyak 154,73 ton atau capaian kinerja sebesar 69,69 % dari target yang telah ditetapkan didalam Perubahan RENSTRA 2021-2026 masih belum tercapai dan permasalahan yang dihadapi tidak tercapainya target produksi budidaya ikan pada tahun 2022 disebabkan beberapa faktor, yaitu :

- 1. Sarana dan Prasarana perikanan budidaya yang belum memadai**
- 2. Biaya operasional yang tinggi pada usaha budidaya ikan yang mengakibatkan penurunan keuntungan**
- 3. Harga barang produk perikanan dari luar daerah lebih murah**
- 4. Kawasan sentra perikanan banyak yang beralih fungsi**
- 5. Petugas penyuluh hanya ada 1 (satu) dari pusat**
- 6. Balai Benih Ikan (BBI) belum optimal**
- 7. Masih tingginya harapan pembudidaya ikan terhadap bantuan baik berupa stimulant maupun benih ikan dan pakan kepada pemerintah daerah**
- 8. Masih kurangnya ketersediaan benih ikan air tawar dan induk ikan unggul yang menjadi faktor kunci keberhasilan usaha budidaya perikanan**
- 9. Kelompok pembudidaya perikanan yang dibentuk masyarakat banyak yang belum/tidak memiliki legalitas kelompok**

Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran dan tidak lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain :

- 1. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya**
- 2. Mengupayakan program kegiatan pakan mandiri**



3. Mengupayakan bantuan benih ikan dan pakan ikan
4. Mengoptimalkan fungsi dan peran balai benih ikan lokal (BBI)
5. Peningkatan dan pembinaan kelembagaan kelompok pembudidaya
6. Optimalisasi kegiatan pembinaan-pembinaan melalui penyuluhan-penyuluhan terhadap perikanan tangkap.
7. Mengupayakan penyuluh perikanan
8. Peningkatan kapasitas pembudidaya
9. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh perikanan

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja sebesar Rp. 273.196.375 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 284.156.375 atau capaian realisasi sebesar 96,14 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 84,09 %. Dengan menggunakan rumus perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 10.960.000 atau sebesar 3,86 %.



Efisiensi SDM khususnya Bidang Budidaya Perikanan dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang, yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 sudah memadai. Efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.5

Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	84,09	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Keci	96,14 %



			a. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan a. Penyedia data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1	
--	--	--	---	--



			(Satu)Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	--	--------------------------------	--

Sumber : DPA Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Dari tabel di 3.5 indikator kinerja didukung oleh program dan kegiatan untuk usaha pencapaiannya. Pada tahun 2022 dengan pencapaian indikator kinerja Produksi Perikanan Budidaya dengan realisasi keuangan 96,14 %. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Perikanan Budidaya adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Dari tabel 3.5 dapat dilihat rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Program pengelola Perikanan Budidaya

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi fisik kegiatan 100% dengan kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

- Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Target anggaran di Renstra sebesar Rp154.750.000,00 dan terealisasi pagu DPA Rp159.288.350,00 dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 156.728.350,00 atau 98,39 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.



Tabel 3.6

Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan I	APBD II	159.288.350,00	156.728.350,00	100	98,39

b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Sub Kegiatan Penyedia data dan informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota .

Target anggaran di Renstra sebesar Rp25.000.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp24.875.625,00 dari pagu anggaran tersebut terserap Rp24.275.625,00 atau 97,59 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.



Tabel 3.7

Sub Kegiatan Penyedia data dan informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Sub Kegiatan Penyedia data dan informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	APBD II	24.875.625,00	Rp24.275.625,00	100	97,59

- Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota

Target anggaran di Renstra sebesar Rp. 684.266.669,00,- dan terealisasi pagu DPA Rp99.992.400,00 dari pagu anggaran tersebut terserap Rp92.192.400,00 atau 92,20 % dan dengan fisik kegiatan terealisasi 100 %.



Tabel 3.8

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	APBD II	Rp99.992.400,00	Rp92.192.400,00	100	92,20

Gambar 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran



Gambar 3. Pelatihan Pembenihan Ikan dan Pembuatan Pakan Ikan



2. Produksi Perikanan Tangkap

Berdasarkan indikator kinerja sasaran “ *Produksi Perikanan Tangkap*” terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 dengan target yang telah ditetapkan di RENSTRA tahun 2021-2026 yaitu sebesar 70 ton dan terealisasi produksi perikanan tangkap 97,54 ton atau melebihi target sebanyak 27,54 Ton, ini terlihat bahwa target produksi terpenuhi dengan capaian 139,34 % dengan hasil evaluasi kinerja dikategorikan Sangat Berhasil.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung produksi perikanan tangkap yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi Produksi Perikanan Tangkap}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap}} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.9

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir**

IKU/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 Vs Tahun	
			2020	2021	2020 (4:3x100)	2021 (5:3x100)
1	2	3	4	5	6	7
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	97,54	95,62	96,8	98,03	99,24

Sebagai salah satu sumber protein hewani yang utama bagi masyarakat, ikan menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan system ketahanan pangan. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran terhadap gizi dan kesehatan menyebabkan tingkat konsumsi ikan per kapita menjadi meningkat. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani, maka pemerintah harus dapat menjaga ketersediaan ikan secara berkelanjutan.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap sebesar 97,54 ton dengan tahun 2021 sebesar 96,8 ton dari hasil perbandingan tersebut menunjukan kenaikan sebesar 0,76 % terhadap capaian tahun 2021.



Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

IKU/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target 2026
1	2	3	4	5
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	97,54	78	139,34

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 97,54 ton dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 78 ton, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2022 sebesar 139,34 % terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.



a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari tabel perbandingan di atas yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemamparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Dari tabel 3.10 di atas capaian indikator peningkatan perikanan tangkap untuk tahun 2022 produksi perikanan tangkap mencapai sebanyak 97,54 ton atau capaian kinerja sebesar 139,34 % dari target yang telah ditetapkan di dalam Perubahan RENSTRA 2021-2026 sudah tercapai dan walaupun target sudah tercapai tetap ada permasalahan terhadap target produksi tangkap pada tahun 2022 disebabkan beberapa faktor, yaitu :

- 1. Berkurangnya populasi ikan di perairan umum/sungai yang diakibatkan oleh pencemaran**
- 2. Profesi sebagai nelayan masih sebagian besar bersifat usaha sampingan (bukan usaha pokok) sehingga produksi dan produktivitas hasil perikanan tangkap fluktuatif**
- 3. Penangkapan ikan masih menggunakan pola tradisional**
- 4. Minimnya alat bantu penangkapan ikan untuk digunakan dalam mempermudah nelayan mencari hasil tangkapan**
- 5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumber daya perikanan dimana masih ada ditemukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan bahan yang dilarang (menggunakan alat setrum dan racun ikan)**
- 6. Terbatasnya kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten dalam Pengawasan terhadap perairan umum (sungai) dikarenakan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berdampak pada pengawasan perikanan yang dialihkan ke kewenangan provinsi sehingga tidak dapat dianggarkan dalam APBD.**



- 7. Minimnya sarana dan prasarana pengawasan untuk digunakan dalam pengawasan perairan umum**
- 8. Masih rendahnya kualitas dan SDM pengawasan perikanan di perairan umum/sungai.**

Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran dan tidak lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain :

- 1. Memperketat pengawasan amdal dan perusahaan tambang/industri yang membuang air limbah ke sungai dengan berkoordinasi dengan dinas terkait;**
- 2. Mengkampanyekan kali/sungai bersih;**
- 3. Melaksanakan restocking induk ikan dan benih ikan pada Perairan Umum Daratan (PUD)/sungai;**
- 4. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat pengawas (POKMAS) perikanan dan berkoordinasi dengan DKP provinsi;**
- 5. Meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan;**
- 6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan dengan berkoordinasi dengan DKP provinsi;**
- 7. Optimalisasi kegiatan pembinaan melalui penyuluhan-penyuluhan terhadap perikanan tangkap;**
- 8. Peningkatan kapasitas aparatur (SDM).**



b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

- 1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.**
- 2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.**

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2022 Realisasi Penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja sebesar Rp. 653.649.111 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 714.029.000 atau capaian realisasi sebesar 91,54 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 139,34 % dengan menggunakan rumus perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 60.379.889 atau sebesar 8,46 %

Efisiensi SDM khususnya Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang, yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 sudah memadai. Efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

b. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (TON)	PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	139,34	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 1. Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu)	91,54



			Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	--	----------------------------------	--

Dari tabel di atas, indikator kinerja didukung dengan beberapa program dan kegiatan untuk usaha pencapaiannya. Pada tahun 2022 dengan pencapaian indikator kinerja produksi perikanan tangkap sebesar 97,54 ton atau sebesar 139,34 %. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut di atas adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan sumber pendanaan dari APBD.

Dari tabel 3.11. dapat dilihat rincian masing - masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Program pengelola Perikanan Tangkap

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi fisik kegiatan 100% dengan kegiatan penunjang sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten/kota

Target anggaran di Renstra sebesar Rp475.000.000,00 dan terealisasi pagu DPA Rp714.029.000,00 dari pagu anggaran tersebut terserap Rp653.649.111,00 atau 91,54 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.

Tabel 3.12
Kegiatan Pengadaan Alat Tangkap Ikan

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten/kota	APBD II	714.029.000,00	653.649.111,00	100	91,54

Gambar 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran





C. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Perikanan kabupaten Malinau dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan-pelaksanaan Program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 3.13
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perikanan kabupaten Malinau Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	998.185.375,00	926.845.486,00	92,85

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Alokasi Anggaran Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2022 sebesar Rp5.056.503.146,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp4.568.605.737,00 atau sebesar 90,35 %.

Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Malinau terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja Operasional. Untuk perincian tertuang dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.14

Laporan dan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Tahun 2022

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah kabupaten/Kota			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.958.319.021,00	3.542.031.501,00	89,48
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.387.000,00	24.387.000,00	100
	Penyelenggaraan Rapat, koordinasi dan konsultasi skpd	69.096.000,00	69.021.000,00	99,89
	Penyediaan Barang	6.515.750,00	6.320.750,00	97,01



	Cetakan dan Penggandaan			
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			
	<i>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	714.029.000,00	653.649.111,00	91,54
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
	<i>Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil</i>			
	Pemberian Pendampingan, kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,Serta	159.288.350,00	156.728.350,00	98,39



	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>			
	Penyedia Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.875.625,00	24.275.625,00	97,59
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>			
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	99.992.400,00	92.192.400,00	92,20

Tabel 3.15

Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE
Belanja Daerah	5.056.503.146,00	4.568.605.737,00	90,35
1.Belanja	5.036.503.146,00	4.548.605.737,00	90,31



Operasional			
a.Belanja Pegawai	3.960.519.021,00	3.543.391.501,00	89,46
b.Belanja Barang dan Jasa	710.134.125,00	639.364.236,00	90,03
c.Belanja Bantuan Sosial	365.850.000,00	365.850.000,00	100
2.Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	100



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Permentan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjan Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pencapaian sasaran/target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau tahun 2022 belum sepenuhnya terwujud dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal berkaitan dengan :

- a. Dinas Perikanan merupakan Perangkat Daerah (PD) yang baru terbentuk di awal Januari 2017;**
- b. Masih rendahnya pemahaman dan penerapan tugas pokok dan fungsi oleh masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran pembangunan sektor perikanan;**
- c. Masih minimnya tenaga Penyuluh Perikanan;**
- d. Belum optimalnya peran dan fungsi BBI.**

1. Faktor Eksternal diantaranya adalah :

- a. Masih tingginya harapan para pembudidaya ikan terhadap bantuan baik berupa stimulan maupun benih ikan dan pakan kepada Pemerintah Daerah;**
- b. Masih kurangnya minat para usia produktif/pemuda untuk bergerak di bidang usaha budidaya;**



- c. **Pola Budidaya Perikanan oleh masyarakat di Kabupaten Malinau masih bergantung dengan warisan budaya/kebiasaan turun temurun menyebabkan produktivitas hasil perikanan masih rendah;**
- d. **Profesi sebagai pembudidaya ikan dan nelayan masih sebagian besar bersifat usaha sampingan (bukan usaha pokok) sehingga produksi dan produktivitas hasil perikanan fluktuatif sangat bergantung dengan intervensi pemerintah berupa alokasi anggaran terkait;**
- e. **Sarana dan prasarana nelayan yang masih minim;**
- f. **Berkurangnya populasi ikan di perairan umum yang diakibatkan pencemaran dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (penggunaan racun dan setrum);**
- g. **Harga barang produk perikanan dari luar lebih murah;**
- h. **Pengawasan perairan umum yang belum optimal.**

B. Langkah Perbaikan

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, Dinas Perikanan Kabupaten Malinau akan mengupayakan langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- 1. Memaksimalkan fungsi dan peran Dinas Perikanan di tengah keterbatasan anggaran;**
- 2. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada seluruh pembudidaya perikanan termasuk para pemuda untuk bergerak berusaha pada sektor perikanan;**
- 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran BBI Kaliamok;**
- 4. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil tangkap perikanan;**
- 5. Mengupayakan agar tersedia PPL Perikanan yang saat ini hanya ada 2 (dua) PPL dari pusat;**
- 6. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Perikanan;**



- 7. Peningkatan dan pembinaan kelembagaan kelompok pembudidaya dan nelayan melalui penilaian kemampuan kelompok pembudidaya dan nelayan secara rutin;**
- 8. Melaksanakan koordinasi Instansi terkait dengan memperketat pengawasan amdal dan perusahaan tambang/industri yang membuang air limbah ke sungai;**
- 9. Mengkampanyekan kali/sungai bersih;**
- 10. Melaksanakan restocking benih ikan air tawar;**
- 11. Melaksanakan koordinasi dengan DKP Provinsi terkait dengan pengawasan, pengolahan dan pemasaran.**

Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2022 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan kinerja pemerintah daerah yang lebih transparan, akuntabel dan berkualitas sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera, dengan ditopang oleh program dan kegiatan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.